

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief Sidharta, B. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi dan Pelaksanaannya*. Edisi revisi, cet. ke-12. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Boer Mauna. *Hukum Pertanahan Nasional*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Bernhard Limbong. *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015.
- Dyara Radhite Oryza Fea. *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*. Yogyakarta: Legality, 2018.
- Kalo Syafruddin. *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2004.
- Maria S. W. Sumardjono. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Mudakir Iskandar Syah. *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Cet. I. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Sahnan. *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Salindeho, John. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*. Bandung: Prenada Media, 2005.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sudjito et al. *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan, dan Pendayagunaan Tanah serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*. Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2012.
- Sumardjono, Maria S. W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Reflektif Kritis terhadap Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Sastro, Dhoho A., M. Yasin, Ricky Gunawan, Rosmi Julitasari, dan Tandiono Bawor. *Mengenal Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2010.
- Rubai, Achmad. *Hukum Pengadaan Tanah*. Malang: Bayu Media, 2007.

JURNAL

- Apriyanto, Nova, dan Ufran Ufran. “Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi atas Tanah Menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.” *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023).
- Bhudianto, Wahyu. “Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.” *Transformasi* 29, no. 1 (2016).
- Fengky Kotalewala, Adonia Ivone Laturette, dan Novyta Uktolseja. “Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum.” *SASI* 26, no. 3 (2020).
- Haq, Wasith Abdul, Nur Adhim, dan Fifiana Wisnaeni. “Analisis Yuridis terhadap Asas Nasionalitas dalam Hukum Tanah (Studi Kasus Putusan

- Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015).” *Diponegoro Law Journal* 7, no. 4 (2018).
- Hutapea, Marthen. “Penerapan Prinsip Layak dan Adil dalam Pemberian Ganti Kerugian di Indonesia (Studi Kasus di Kota Dumai, Provinsi Riau).” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 1 (2023).
- Ilham, Gufran, Waliyudin, Adnan A., Loamena, R. A., dan Fitrah, M. “Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Desa Karampi yang Belum Terjangkau Sinyal: Telaah Konstitusi Pasal 28F UUD NRI.” *Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023).
- Istriani, dan S. Fikri. “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol.” *Mimbar Keadilan* 16, no. 2 (2023).
- Jennifer, C., dan D. Abhinaya. “Penyelesaian Sengketa Tanah bagi Pemilik Lahan yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol.” *Gorontalo Law Review* 6, no. 1 (2023).
- Kristiyanto, Eko Noer. “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 2 (2016).
- L. I. Mindarti, C. Saleh, dan A. P. Galih. “Penerapan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6, no. 1 (2022).
- Mulyadi. “Asas dan Prinsip Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum.” *Varia Hukum* 38, no. 29 (2017).
- Muwahid. “Prinsip-Prinsip Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2016).
- Nova Apriyanto dan Ufran Ufran. “Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi atas Tanah Menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.” *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023).
- Prasetyo, Priyo Katon, Rendra Vera Christine, dan Sudibyanung. “Implementasi Asas Keterbukaan pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

- Kepentingan Umum: Antara Harapan dan Kenyataan.” *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 6, no. 1 (2020).
- Pratama, B. I., dan D. P. S. Ari. “Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik.” *Surya Abdimas* 5, no. 3 (2021).
- Rachman, Amelia. “Implementasi Asas Keselarasan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.” *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019).
- Rejekiingsih, Triana. “Asas Fungsi Sosial Hak atas Tanah pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia).” *Yustisia: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2016).
- Renngur, Ramdani Husein. “Analisis Ideologi Dibalik Kebijakan Reforma Agraria pada Masa Orde Lama (1945–1965) dan Orde Baru (1965–1968).” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 5 (2023).
- Rosmidah dan Dony Yusra Pebrianto. “Transparency Principle on Land Acquisition for Agrarian Justice.” *Jambe Law Journal* 3, no. 1 (2020).
- Rumampuk, Clifert Marcello, Maarthen Yoseph Tampanguma, dan Frits Marannu Dapu. “Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Lahan Masyarakat Menurut Peraturan PerUndang-Undangan (Studi Kasus Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan).” *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 1 (2025).
- Saniah. “Legal Review of Legal Protection for Communities Affected by Land Acquisition for Public Interest under Law No. 2 of 2012 on Land Acquisition for Development in the Public Interest.” *International Journal of Sociology and Law* 2, no. 3 (2025).
- Sari, Ni Luh Ariningsih. “Konsep Hak Menguasai Negara terhadap Tanah dalam Hukum Tanah (UUPA) dan Konstitusi.” *Jurnal Ganeswara* 15, no. 1 (2021).
- Sam’un, Ali, Tamaulina Sembiring, dan Ismaidar. “Legal Protection for Land Rights Holders in Land Acquisition for Development in the Public Interest.” *International Journal of Society and Law* 2, no. 3 (2024).

- Suryatika, M. A. W. U., I. G. B. Suryawan, dan I. Wm. Arthanaya. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Milik Atas Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020).
- Suntoro, A. "Penilaian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Perspektif HAM." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 5, no. 1 (2019).
- Sumardjono, Maria S. W. "Tanah dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 3 (2011).
- Wahyuni, Ratna. "Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal yang Layak bagi Warga Terdampak Penggusuran." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 4 (2022).
- Winastwan, Rheza Ega. "Studi Komparasi Terhadap Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik." *Al Ma Mun: Jurnal Kajian Kepustakawanan dan Informasi* 3, no. 1 (2022).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

BERITA/SUMBER DARING

- DJKN Kementerian Keuangan. "Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam PerUndang-Undangan." 9 Juni 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknk-kisaran/baca->

<artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-PerUndang-Undangan.html>.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. *Kerangka Acuan Kerja: Pembangunan Gedung Inkubator Solo Technopark Tahap IV, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan IPTEK dan DIKTI, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018*. 2018. Scribd. Diakses 23 Februari 2026. <https://www.scribd.com/document/387347585/kak>.

Pemerintah Kota Surakarta. “Solo Technopark: Tempat Menyemai Kreativitas dan Inovasi di Kota Surakarta.” Diakses 20 Desember 2025. https://setda.surakarta.go.id/page/detail_berita/solo-technopark-tempat-menyemai-kreativitas-dan-inovasi-di-kota-surakarta.

Solo Technopark. “Profil.” Diakses 25 Desember 2025. <https://solotechnopark.id/profil>.

Solo Technopark. “Solo Technopark.” Diakses 6 Mei 2026. <https://solotechnopark.id/>.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Putusan Nomor 010/PTS-A/XI/2018, 8 November 2018.

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Putusan Nomor 4/G/KI/2018/PTUN.SMG, 22 November 2018.